

# Laporan Eksekutif

## STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI JAWA TIMUR 2013



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

**LAPORAN EKSEKUTIF  
STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN  
PROVINSI JAWA TIMUR 2013**

Nomor Publikasi : 35523.1401

Katalog : 4601001.35

Naskah :  
Seksi Statistik Ketahanan Sosial  
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :  
Seksi Statistik Ketahanan Sosial  
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

<http://jatim.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Perkembangan politik sejak era reformasi telah berkembang pesat. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu serta semakin berimbangnnya peran lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah dan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung membuat politik di Indonesia semakin dinamis.

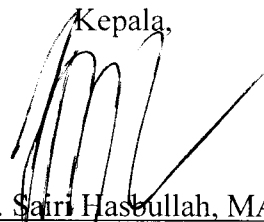
Dinamika yang terjadi di dunia politik berimbas pada bidang lain terutama bidang keamanan. Politik dan keamanan saling terkait satu sama lain. Suatu ketika politik mempengaruhi keamanan dan di lain waktu kemanan mempengaruhi politik.

Perkembangan politik dan kemanan yang dinamis tersebut memerlukan alat untuk melakukan monitoring. Karena itu diperlukan adanya data yang bisa digunakan untuk memonitor dinamika politik dan keamanan. Laporan Eksekutif Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Timur 2013 ini merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang didapat dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yang bersumber dari dinas/instansi terkait.

Laporan Eksekutif ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna data secara cepat dan mudah. Pada sisi lainnya informasi tersebut akan mempermudah para pengambil kebijakan baik di pemerintahan maupun legislatif untuk melakukan perencanaan, evaluasi dan monitoring. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan penulisan Laporan Eksekutif Statistik Politik dan Keamanan di masa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Surabaya, Agustus 2014

Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Timur  
Kepala,



M. Satri Hasbullah, MA  
NIP. 19580523 198103 1 011

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.1 Politik .....	2
1.1.2 Keamanan .....	2
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Sumber Data .....	2
<b>BAB II. PENDUDUK DAN PEMILUKADA</b>	<b>3</b>
2.1. Penduduk .....	3
2.2. Partisipasi Penduduk dalam Pemilukada .....	4
2.3. Perolehan Suara Pasangan Terpilih Pemilukada.....	5
<b>BAB III. ANGGOTA DPRD</b>	<b>8</b>
3.1. Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin .....	8
3.2. Anggota DPRD menurut Kelompok Umur .....	9
3.3. Anggota DPRD menurut Tingkat Pendidikan .....	9
<b>BAB IV. KEAMANAN</b>	<b>11</b>
4.1. Jumlah Tindak Pidana .....	11
4.2. Jumlah Orang yang Terlibat Tindak Kejahatan .....	12
4.3. Jumlah Pidana Terhadap Fisik Manusia .....	14
4.3. Jumlah Pidana Terhadap Hak Milik (Barang) .....	15
<b>LAMPIRAN</b>	<b>17</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1.</b> Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 .....	3
<b>Gambar 2.</b> Persentase Pemilih Terdaftar yang Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilukada Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur .....	5
<b>Gambar 3.</b> Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Kepala Daerah Terpilih Kabupaten/Kota di Jawa Timur .....	6
<b>Gambar 4.</b> Persentase Bupati/Walikota Terpilih menurut Jenis Kelamin .....	7
<b>Gambar 5.</b> Persentase Bupati/Walikota Terpilih menurut Pendidikan .....	7
<b>Gambar 6.</b> Persentase Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin, menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 .....	8
<b>Gambar 7.</b> Persentase Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Kelompok Umur di Jawa Timur Tahun 2013 .....	9
<b>Gambar 8.</b> Persentase Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Tingkat Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2013 .....	10
<b>Gambar 9.</b> Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan, Diselesaikan dan Persentase yang Diselesaikan di Jawa Timur Tahun 2013.....	11
<b>Gambar 10.</b> Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Persentase yang Diselesaikan Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013.....	12
<b>Gambar 11.</b> Jumlah Orang yang Terlibat Tindak Kejahatan Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 .....	13
<b>Gambar 12.</b> Persentase Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia di Jawa Timur Tahun 2013 .....	14
<b>Gambar 13.</b> Persentase Tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang) di Jawa Timur Tahun 2013 .....	15

# BAB I. PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dewasa ini nampaknya dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan/potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam *real* politik Indonesia, paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal, dari dua level tersebut yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Isu-isu bidang politik dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Permasalahan bidang politik dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi, khususnya selama rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (RPJMN) 2010-2014 tidaklah ringan. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik dan keamanan. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan, karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu antar wilayah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur berupaya memenuhi kebutuhan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan di Provinsi Jawa Timur dengan melakukan kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan yang dituangkan melalui ringkasan eksekutif. Output dari ringkasan eksekutif ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan

antar waktu dan wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

### **1.1.1. Politik**

Perkembangan politik merupakan sebuah kondisi yang mencakup seluruh ruang lingkup ilmu politik yang tumbuh, berkembang, atau mengalami kemunduran pada satu dekade kepemimpinan. Perkembangan politik di Indonesia sebagai bagian dari kehidupan sosial-politik, secara umum mengalami pasang surut. Perkembangan politik sebagai salah satu tujuan berpolitik, menjadi bagian dari pengertian-pengertian yang dibuat maupun sikap-sikap yang berkembang untuk mewujudkan politik sebagai bagian dari kualitas suatu bangsa. Politik juga menjadi acuan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bertransformasi pada kecapaian sistem yang baik, dan terjaminnya suatu pemerintahan yang baik.

### **1.1.2. Keamanan**

Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat kepada status keamanan di suatu wilayah. Permasalahan yang ditimbulkan dari mulai masalah hukum, keamanan dan ketertiban juga mengalami perkembangan yang cukup pesat hal ini menuntut para pelaksana di bidang ini untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penulisan memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan di Provinsi Jawa Timur sampai level kabupaten/kota.

## **1.3. Sumber Data**

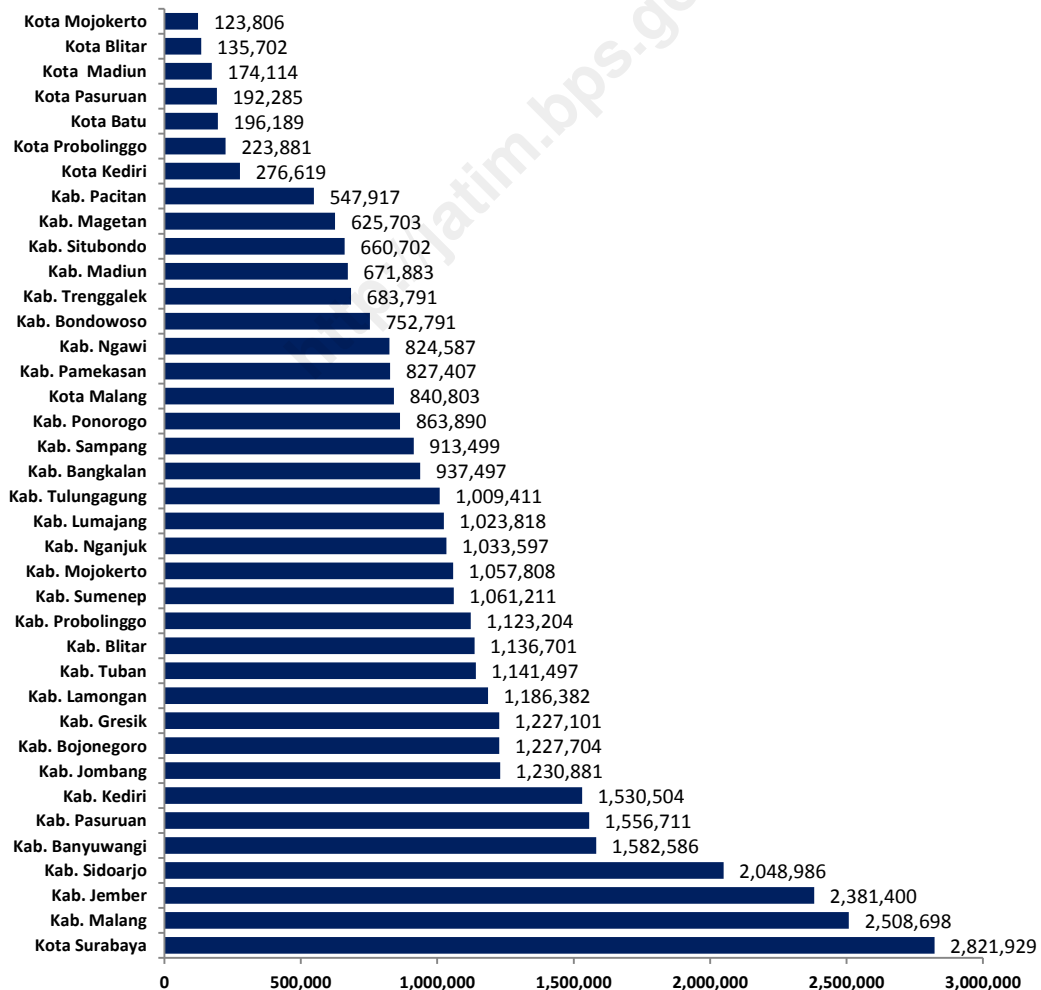
Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi eksekutif Politik dan Keamanan tahun 2013 berasal dari pengumpulan data statistik politik dan keamanan yang merupakan kegiatan kompilasi data registrasi dari instansi terkait. Sebagai hasil registrasi, data statistik politik dan keamanan diharapkan mampu menggambarkan kejadian di Januari-Desember 2013.

## BAB II. PENDUDUK DAN PEMILUKADA

### 2.1. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam pembangunan, penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri. Begitupula dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Jumlah penduduk dalam kegiatan politik merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara, dalam bidang keamanan semakin banyak penduduk tentunya semakin besar pula permasalahan yang akan timbul.

**Gambar 1.**  
**Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Proyeksi Penduduk 2010-2020



Dari Gambar 1, didapatkan informasi bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sebanyak 2.821.929 jiwa. Sebaliknya Kota Mojokerto merupakan kota di Jawa Timur yang mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 123,806 jiwa. Dengan melihat besaran jumlah penduduk, peserta pemilihan umum (pemilu) dapat mengukur kekuatannya dalam memenangkan pemilu yang berlangsung, karena rakyat memegang kedaulatan secara penuh. Suara rakyat yang disalurkan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil akan sangat menentukan.

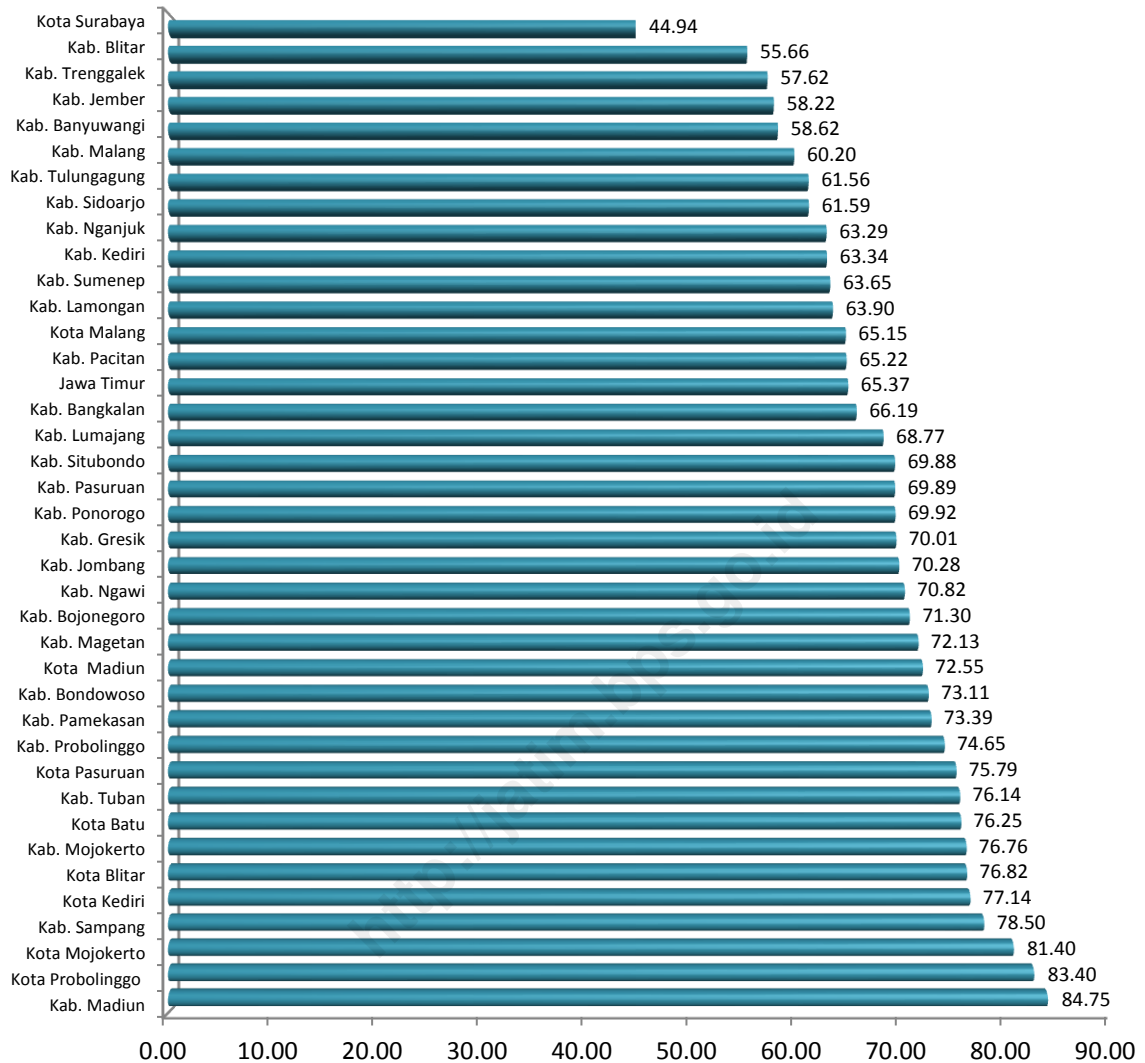
## **2.2. Partisipasi Penduduk dalam Pemilukada**

Dalam undang-undang tentang pemilu nomor 8 tahun 2012, disebutkan pada pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Hak memilih ini juga termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) di kabupaten/kota setempat.

Berdasarkan data yang tersedia, dari pelaksanaan pemilukada terakhir di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur, masih banyak penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya. Secara umum rata-rata penduduk yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada terakhir di kabupaten/kota di Jawa Timur sekitar 65,37 persen. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua mengingat banyaknya penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya sekitar 34,63 persen. Kondisi ini perlu dicari permasalahannya, apakah penyebabnya karena sosialisasi pelaksanaan pemilukada yang kurang dipahami oleh masyarakat atau memang penduduk yang tidak lagi respon terhadap pemilukada, atau barangkali juga data pemilih yang bermasalah. Kurangnya partisipasi penduduk untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan bupati/walikota, seharusnya bisa menjadi perhatian ke depan untuk mensukseskan pemilihan umum. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dan dibutuhkan profesionalisme panitia penyelenggara pemilihan umum.

Kalau dilihat partisipasi penduduk dalam pemilukada terakhir menurut kabupaten/kota di Jawa Timur, partisipasi pemilih yang tertinggi berada di Kabupaten Madiun mencapai 84,75 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Surabaya sekitar 44,94 persen. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilukada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

**Gambar 2**  
**Persentase Pemilih Terdaftar yang Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilukada**  
**Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur**



Sumber : KPUD Kabupaten/Kota

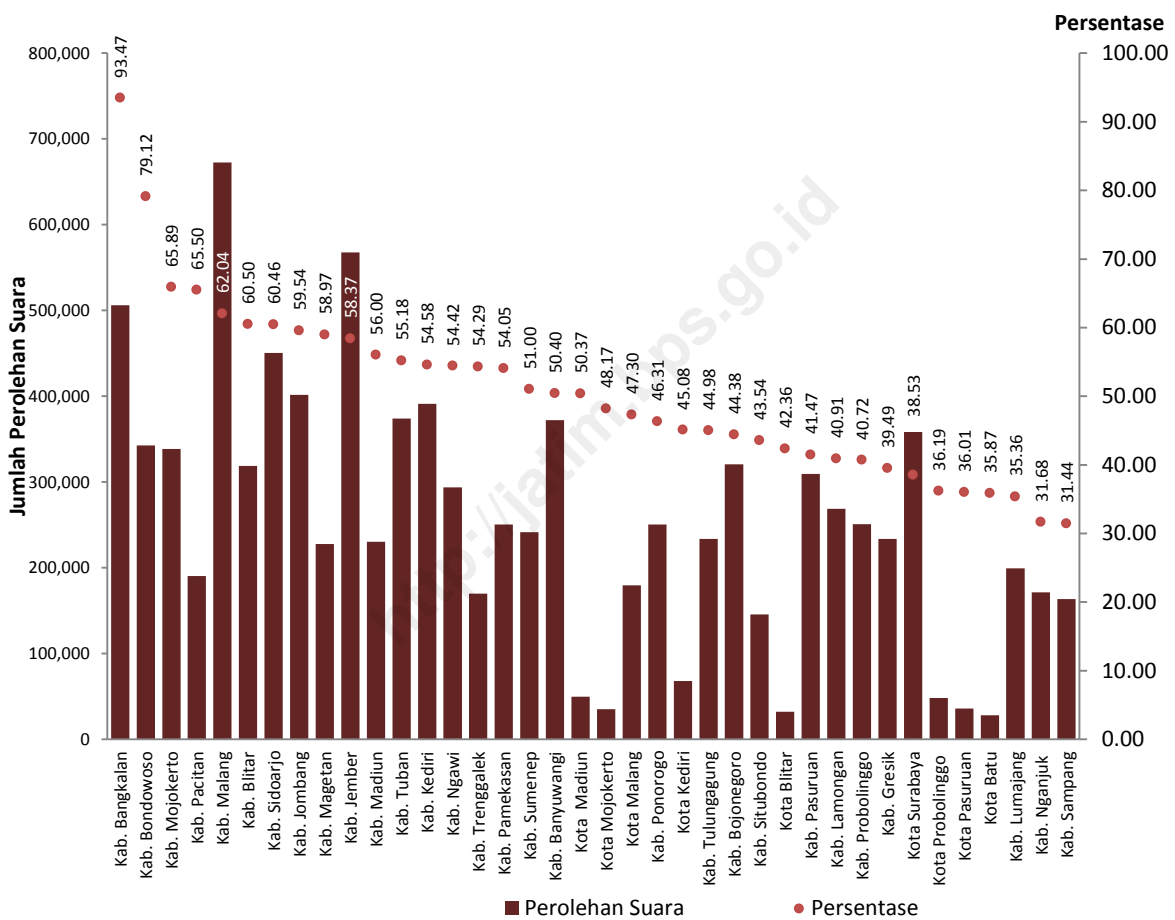
### 2.3. Perolehan Suara Pasangan Terpilih Pemilukada

Jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilu kada akan menentukan kemenangan pasangan calon bupati/walikota. Besaran dukungan suara masyarakat sebagai penentu kemenangan dalam pemilu kada dapat mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon bupati/walikota.

Besaran jumlah perolehan suara antar kabupaten/kota tentunya akan sangat tergantung pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan yang menggunakan hak

pilihnya. Jika dilihat dari besaran jumlah suara pasangan yang terpilih dalam pemilukada kabupaten/kota di Jawa Timur, diperoleh suara terbanyak adalah pasangan terpilih Pemilukada di Kabupaten Malang yaitu sebesar 672.511 suara dan yang paling sedikit di Kota Batu yaitu sebesar 28.008 suara. Bila dilihat berdasarkan persentase, tertinggi adalah pasangan terpilih pemilukada di Kabupaten Bangkalan mencapai 93,47 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Sampang sebesar 31,44 persen.

**Gambar 3.**  
**Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Kepala Daerah Terpilih Kabupaten/Kota di Jawa Timur**

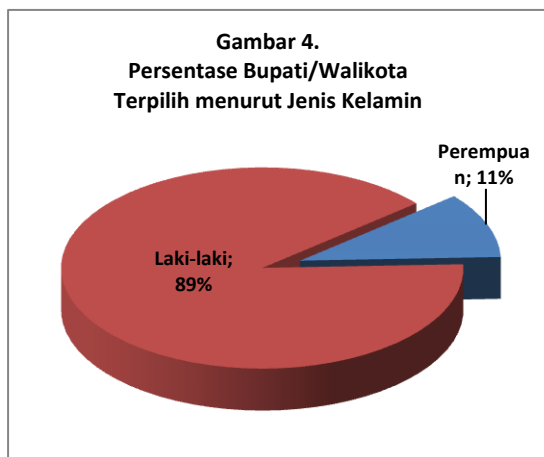


Sumber: KPUD Kabupaten/Kota

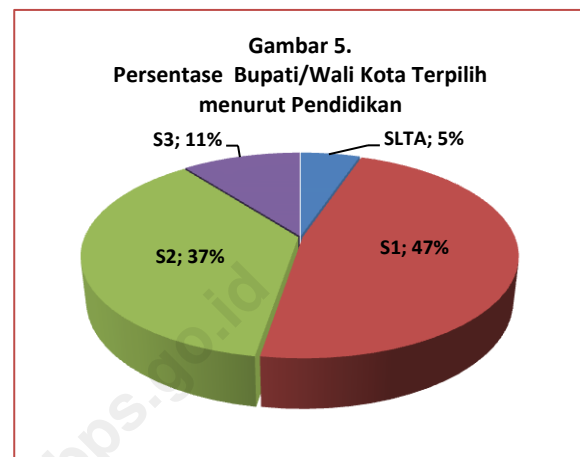
Berdasarkan jenis kelamin, bupati/wali kota terpilih pemilukada terakhir sebanyak 34 kepala daerah (89 persen) adalah laki-laki dan sebanyak 4 kepala daerah atau hampir 11 persen adalah perempuan, yaitu Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.

Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah tingkat kualitas dari calon bupati/wali kota atau juga kemungkinan karena masyarakat kita secara

umum masih menyukai dipimpin oleh laki-laki. Jika kualitas yang menjadi pertimbangan para pemilih dalam menentukan calon kepala daerah yang akan dipilih, tentunya ini harus menjadi perhatian bagi para peserta pemilu untuk memilih calon bupati atau wali kota yang mempunyai kualitas pendidikan yang lebih baik atau mempunyai kualitas kepemimpinan yang lebih baik, namun jika penyebabnya adalah karena masih kuatnya pandangan bahwa pemimpin adalah laki-laki maka akan lebih sulit merubah paradigma sosial yang ada di masyarakat.



Sumber: KPUD Kabupaten/Kota



Sumber: KPUD Kabupaten/Kota

Tingkat pendidikan sangat menentukan cara pandang seseorang dalam penyelesaian masalah. Dengan tingginya tingkat pendidikan kepala daerah tentunya akan lebih meningkatkan kualitas hasil dari kinerja kepala daerah itu sendiri dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayahnya.

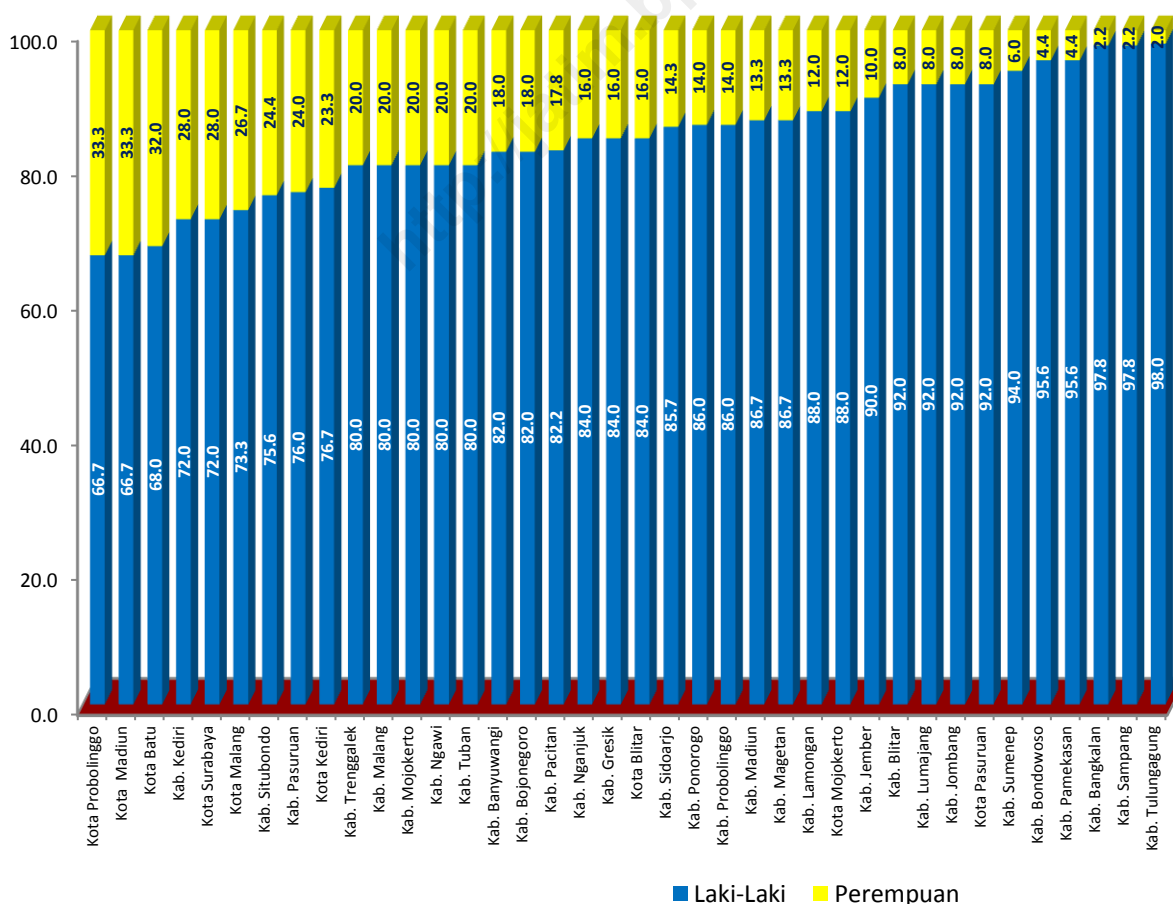
Kalau dilihat dari tingkat pendidikan terakhir bupati/wali kota hasil pilkada di 38 wilayah Jawa Timur, sekitar 95 persen berpendidikan sarjana keatas dengan rincian sebanyak 11 persen tamatan S3, 37 persen tamatan S2 dan 47 persen tamatan S1. Sedangkan yang berpendidikan setingkat SLTA hanya sekitar 5 persen.

## BAB III. ANGGOTADPRD

### 3.1. Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah anggota legislatif pilihan rakyat atau wakil rakyat yang mewakili aspirasi dari rakyat. Di dalam undang-undang pemilu ada kewajiban bagi parpol untuk memenuhi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan. Kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pada pasal 58 dan 59 serta Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD pada pasal 11. Keterwakilan perempuan dalam anggota dewan akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang dewan, terutama keputusan yang menyangkut keperihakan terhadap perempuan.

**Gambar 6.**  
**Persentase Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013**



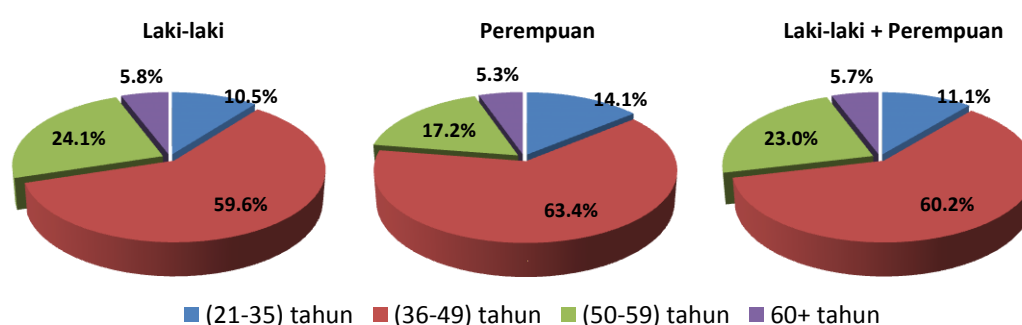
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Secara umum semua partai politik peserta pemilu telah mengusung perempuan sebagai caleg, sesuai dengan undang-undang pemilu sebanyak 30 persen dari total calon yang ada. Namun kenyataannya dari jumlah calon tersebut yang terpilih menjadi anggota DPRD rata-rata di Jawa Timur baru sekitar 15,6 persen. Jumlah anggota DPRD yang sudah memenuhi kuota 30 persen dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur baru 3 kota yaitu, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Batu masing-masing sebesar 33,3 persen, 33,3 persen dan 32 persen. Persentase jumlah anggota DPRD perempuan yang terendah adalah Kabupaten Tulungagung yaitu sekitar 2 persen. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bagi partai politik peserta pemilu untuk lebih meningkatkan kaderisasi anggota dari kelompok perempuan.

### 3.2. Anggota DPRD menurut Kelompok Umur

Kalau dilihat dari kelompok umur, anggota DPRD kabupaten/kota di Jawa Timur baik laki-laki maupun perempuan, lebih dari 70 persen pada kelompok usia-usia muda (21 - 49 tahun), 70,1 persen untuk laki-laki, 77,5 persen untuk perempuan, dan 71,3 persen untuk keseluruhan. Kondisi ini tentunya diharapkan lebih meningkatkan kinerja anggota dewan, dengan harapan pada kelompok usia yang produktif ini hasil kinerja dewan juga lebih produktif. Namun demikian, masih terdapat kelompok usia tua (60 tahun ke atas) yang lebih dari 5 persen.

Gambar 7.  
Persentase Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Kelompok Umur di Jawa Timur Tahun 2013



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

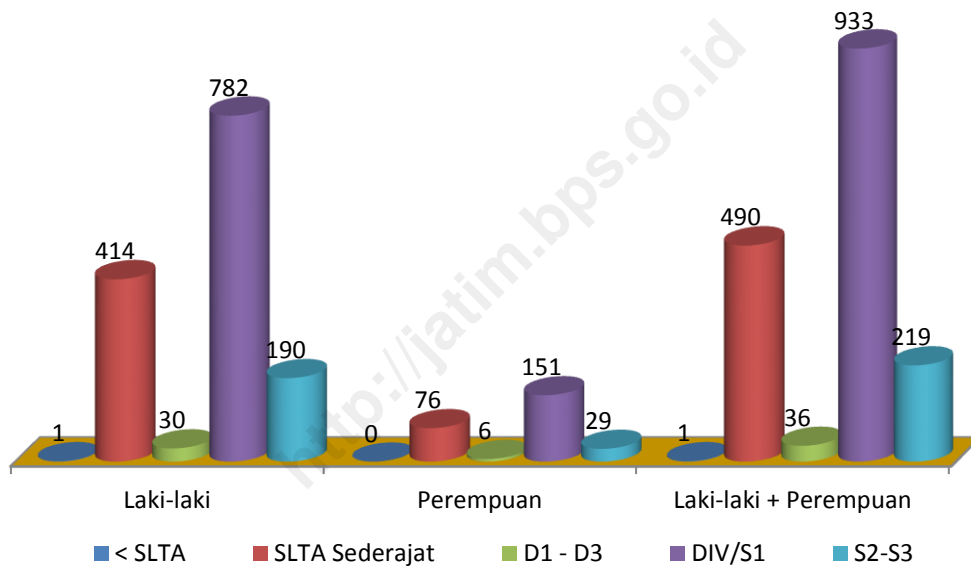
### 3.3. Anggota DPRD menurut Tingkat Pendidikan

Pada Gambar 8 terlihat bahwa secara keseluruhan, tingkat pendidikan anggota DPRD kabupaten/kota di Jawa Timur sekitar 13,0 persen (219 orang) adalah tamatan S2/S3, dan sekitar 68,6 persen (1.152 orang) adalah tamatan Sarjana baik D.IV/S1. Namun

juga masih terdapat sekitar 29,2 persen (490 orang) yang berpendidikan setingkat SLTA dan bahkan ada yang dibawah SLTA walaupun sangat kecil yaitu sekitar 0,2 persen (1 orang).

Tingginya tingkat pendidikan anggota DPRD kabupaten/kota ini diharapkan akan memberikan pemikiran yang lebih cemerlang dalam mengambil keputusan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentunya dengan semakin tinggi pendidikan akan mewarnai pola pikir dan cara pandang anggota DPRD terhadap suatu permasalahan dan dalam mengambil keputusan.

Gambar 8  
 Persentase Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Tingkat Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2013



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

## BAB IV. KEAMANAN

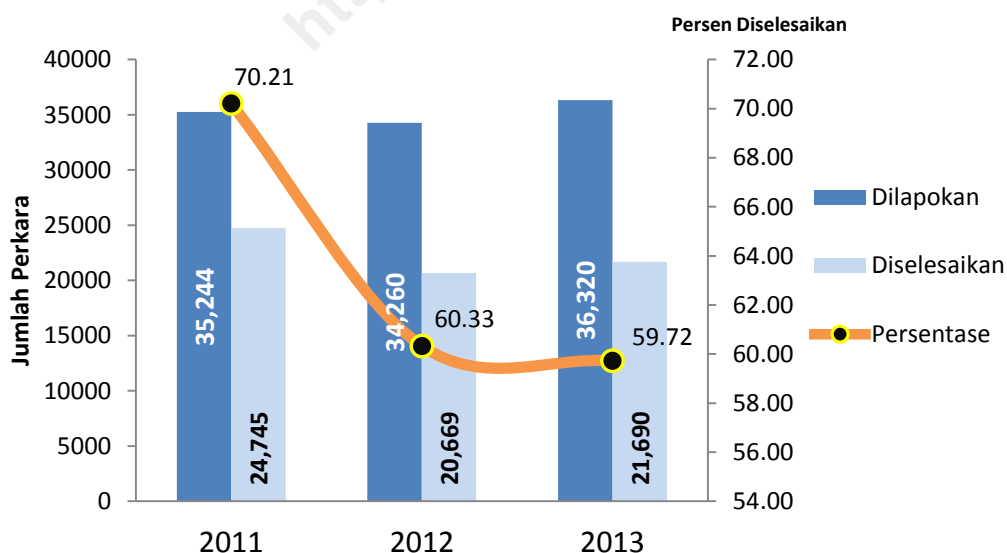
### 4.1. Jumlah Tindak Pidana

Menurut falsafah, dalam kehidupan negara aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara itu. Tanpa kemampuan mempertahankan diri dari ancaman dari luar dan dalam negeri, negara tidak dapat mempertahankan hidupnya, termasuk didalamnya permasalahan hukum yang mengaturnya yang berhubungan sangat erat dengan keamanan.

Pada tahun 2013 permasalahan hukum di Jawa Timur yang menyangkut pelanggaran hukum atau jumlah tindak pidana yang dilaporkan sebanyak 36.320 perkara. Jumlah tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perkara tindak pidana pada dua tahun sebelumnya.

Dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan, yang sudah diselesaikan sebanyak 21.690 perkara atau sekitar 59,72 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah tindak pidana yang telah diselesaikan sedikit mengalami penurunan, pada tahun 2012 dan 2013 persentase tindak pidana yang diselesaikan masih berkisar pada angka sekitar 60 persen.

Gambar 9  
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan, Diselesaikan dan Persentase yang Diselesaikan di Jawa Timur Tahun 2013



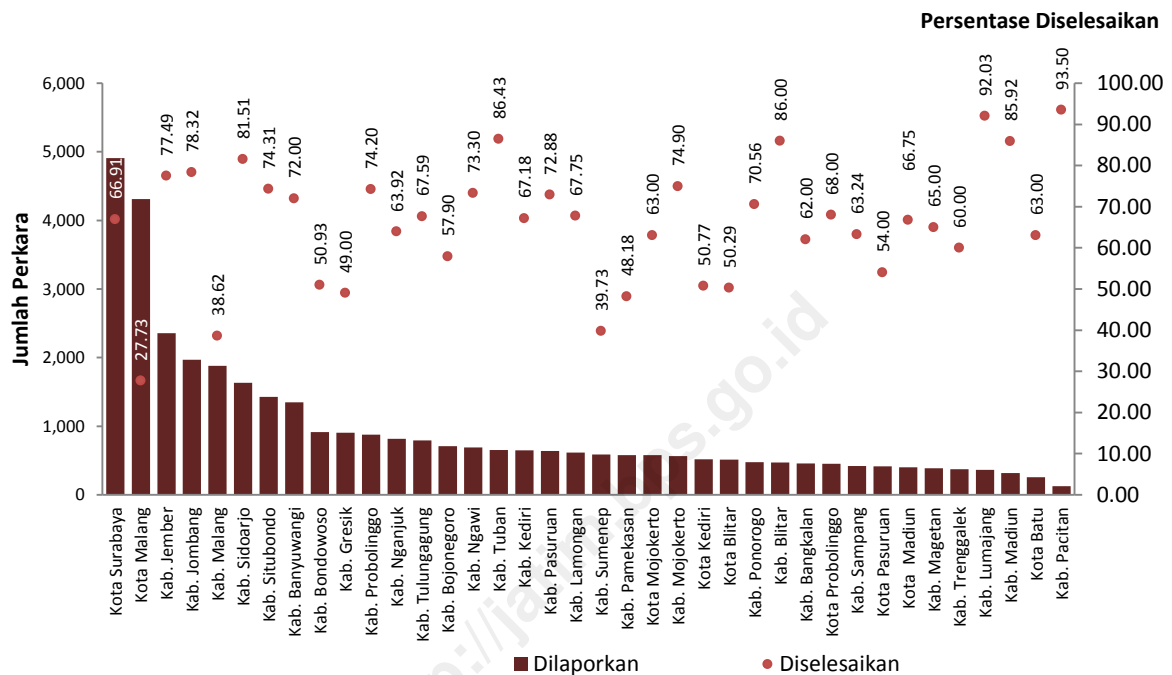
Sumber: Polres/Polresta Kabupaten/Kota

Kalau dilihat menurut kabupaten/kota di Jawa Timur, jumlah tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2013 yang terbanyak adalah di Kota Surabaya yaitu sebesar 4.909



perkara dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Pacitan sebesar 123 perkara. Namun jika dilihat persentase perkara yang diselesaikan yang terbanyak adalah Kabupaten Pacitan yaitu sebesar 93,50 persen dan yang terendah ada di Kota Malang yaitu sebesar 27,73 persen.

Gambar 10.  
Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Persentase yang Diselesaikan Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013

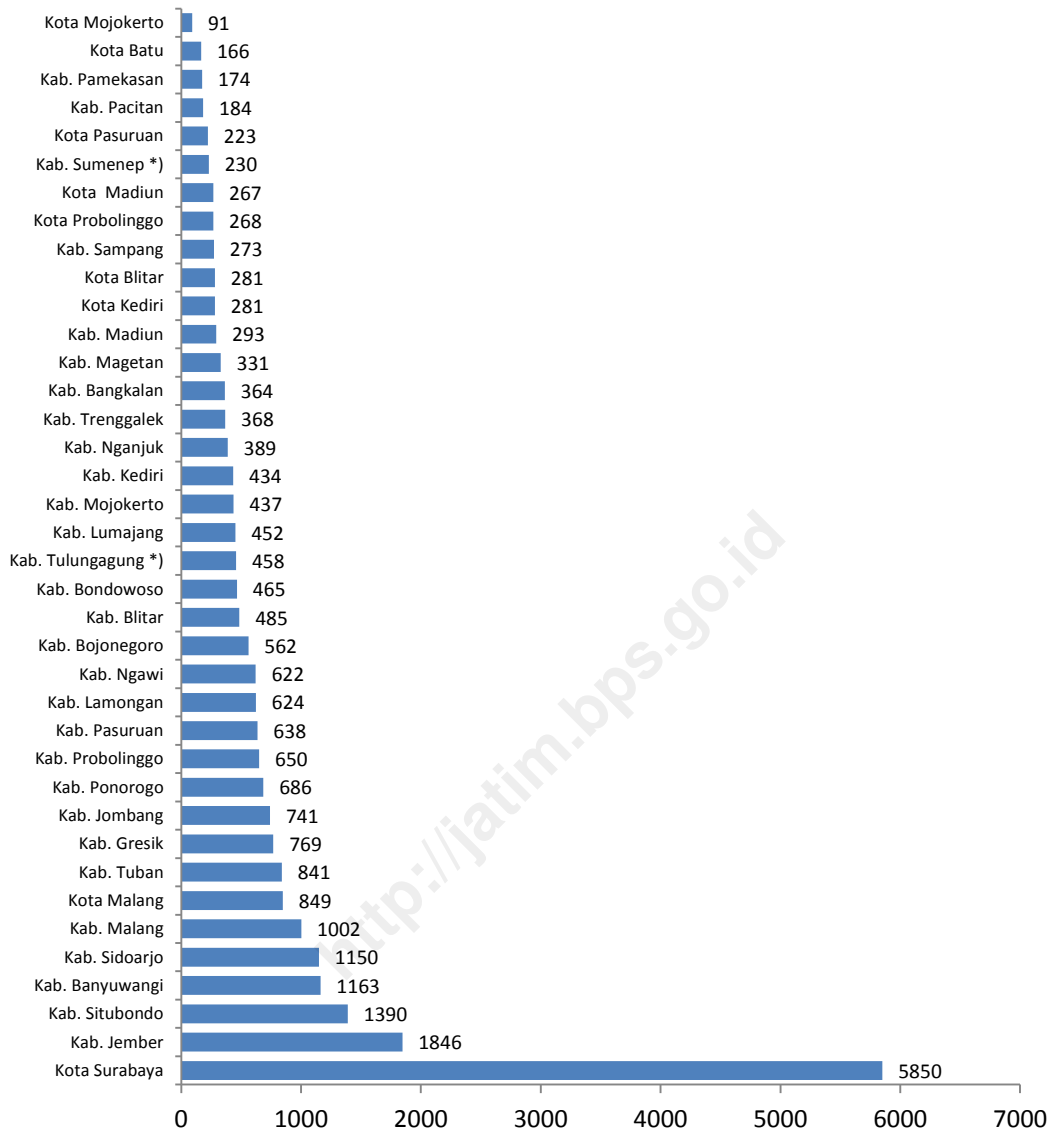


Sumber: Polres/Polresta Kabupaten/Kota

#### 4.2. Jumlah Orang yang Terlibat Tindak Kejahatan

Jumlah orang yang terlibat tindak kejahatan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah perkara tindak kejahatan, bisa saja dalam satu perkara tindak kejahatan orang yang terlibat didalamnya lebih dari satu orang atau sebaliknya, satu pelaku melakukan lebih dari satu tindak kejahatan. Pada tahun 2013 jumlah orang yang terlibat tindak kejahatan yang terbanyak di Kota Surabaya yaitu sebanyak 5.850 orang dan yang paling sedikit di Kota Mojokerto 91 orang. Kalau dilihat menurut jenis kelamin, orang yang terlibat tindak kejahatan sekitar 94,12 persen (24.750 orang) adalah laki-laki dan sekitar 5,88 persen (1.547 orang) adalah perempuan.

**Gambar 11**  
**Jumlah Orang yang Terlibat Tindak Kejahatan Per Kabupaten/Kota**  
**di Jawa Timur Tahun 2013**



Catatan: \*) menggunakan data tahun 2012

Sumber: Polres/Polresta Kabupaten/Kota

Orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan, tidak memandang usia, tidak hanya mereka yang berusia dewasa namun juga ada yang dilakukan oleh anak-anak. Sekitar 95 persen tindak kejahatan dilakukan oleh orang dewasa dan sekitar 5 persen dilakukan oleh anak-anak. Jumlah perkara tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak yang terbesar di Kota Surabaya yaitu 133 anak dan yang terkecil di Kota Probolinggo yaitu 2 anak.

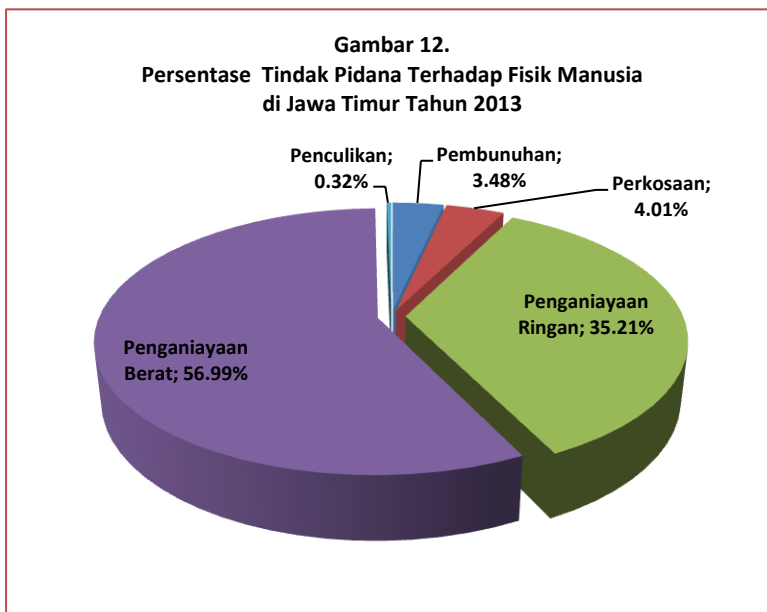
### 4.3. Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.

Adapun jenis-jenis kejahatan terhadap fisik manusia adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
- b. Perkosaan adalah pemaksaan perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Penganiayaan ringan adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain yang tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
- d. Penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain sampai dengan mengakibatkan korban luka/cacat atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari dengan sempurna. Korbannya adalah orang yang dianiaya.
- e. Penculikan/perampasan kemerdekaan adalah perbuatan melarikan seseorang dengan melawan hak, dengan maksud menjadikan orang tersebut di bawah kekuasaan diri pelaku atau di bawah kekuasaan orang lain.

Jumlah persentase tindak pidana terhadap fisik manusia yang banyak terjadi di

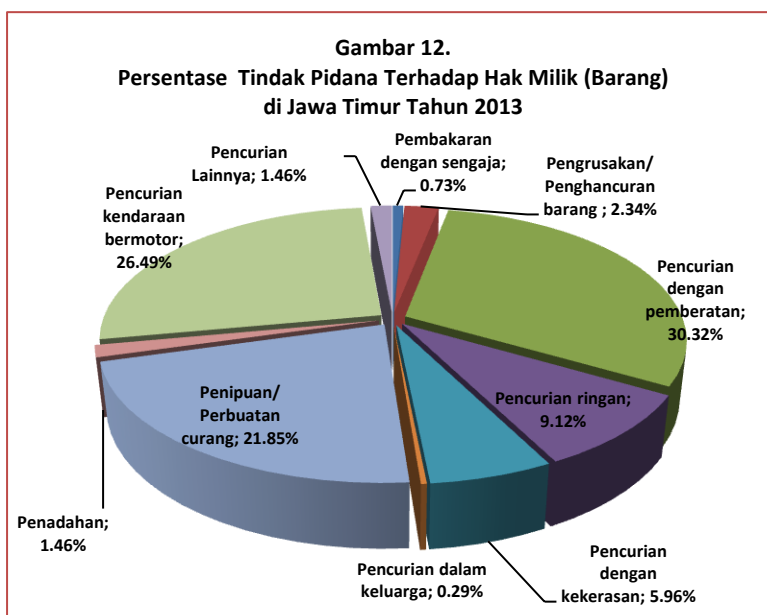


Jawa Timur tahun 2013 adalah penganiayaan berat yaitu mencapai 56,99 persen, kemudian diikuti penganiayaan ringan sebesar 35,21 persen. Selanjutnya, perkosaan (4,01 persen), pembunuhan (3,48 persen), dan yang paling jarang terjadi adalah penculikan (0,32 persen).

#### 4.4. Tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang)

Adapun jenis-jenis kejahatan terhadap hak milik (barang) adalah sebagai berikut :

- a. Pembakaran dengan sengaja adalah perbuatan yang dengan sengaja membakar (misalnya rumah, hutan) yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan;
- b. Pengrusakan/penghancuran adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dan berakibat kerusakan pada barang milik pribadi atau fasilitas umum;
- c. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai dan diikuti dengan pengrusakan ;
- d. Pencurian biasa (ringan) adalah pencurian barang atau ternak bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya yang didahului, tanpa disertai dengan kekerasan terhadap orang/ korban;
- e. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu serta memudahkan/ memberi kesempatan pelaku melarikan diri, atau jika tertangkap basah (kepergok) barang yang dicuri tetap ada ditangan pelaku;
- f. Pencurian dalam keluarga adalah pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.
- g. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat atau dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
- h. Penadahan adalah membeli atau mengumpulkan barang hasil curian;
- i. Pencurian kendaraan bermotor adalah pencurian jenis kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat; dan j. Pencurian lainnya.



Jumlah persentase tindak pidana terhadap hak milik (barang) yang banyak terjadi di Jawa Timur tahun 2013 adalah pencurian dengan pemberatan yaitu mencapai 30,32 persen, kemudian diikuti pencurian kendaraan bermotor sebesar 26,49 persen dan penipuan/perbuatan curang

sebesar 21,85 persen. Selanjutnya, tindak pidana terhadap hak milik (barang) yang jarang terjadi meliputi pembakaran dengan sengaja (0,73 persen) dan pencurian dalam keluarga (0,29 persen).

<http://jatim.bps.go.id>

# LAMPIRAN

**Tabel 1.**  
**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Wilayah (Km2)</b>	<b>Penduduk Laki-Laki</b>	<b>Penduduk Perempuan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	1.434	267.412	280.505	547.917
2 Kab. Ponorogo	1.425	431.382	432.508	863.890
3 Kab. Trenggalek	1.257	339.709	344.082	683.791
4 Kab. Tulungagung	1.159	492.287	517.124	1.009.411
5 Kab. Blitar	1.765	568.596	568.105	1.136.701
6 Kab. Kediri	1.534	766.696	763.808	1.530.504
7 Kab. Malang	3.478	1.260.414	1.248.284	2.508.698
8 Kab. Lumajang	1.814	498.787	525.031	1.023.818
9 Kab. Jember	3.316	1.167.801	1.213.599	2.381.400
10 Kab. Banyuwangi	3.606	787.384	795.202	1.582.586
11 Kab. Bondowoso	1.556	366.605	386.186	752.791
12 Kab. Situbondo	1.666	322.716	337.986	660.702
13 Kab. Probolinggo	1.728	548.391	574.813	1.123.204
14 Kab. Pasuruan	1.492	769.705	787.006	1.556.711
15 Kab. Sidoarjo	722	1.029.003	1.019.983	2.048.986
16 Kab. Mojokerto	980	529.192	528.616	1.057.808
17 Kab. Jombang	1.128	613.296	617.585	1.230.881
18 Kab. Nganjuk	1.300	513.398	520.199	1.033.597
19 Kab. Madiun	1.128	331.417	340.466	671.883
20 Kab. Magetan	712	304.595	321.108	625.703
21 Kab. Ngawi	1.405	401.808	422.779	824.587
22 Kab. Bojonegoro	2.330	604.691	623.013	1.227.704
23 Kab. Tuban	1.993	563.306	578.191	1.141.497
24 Kab. Lamongan	1.759	576.208	610.174	1.186.382
25 Kab. Gresik	1.251	607.893	619.208	1.227.101
26 Kab. Bangkalan	1.310	447.189	490.308	937.497
27 Kab. Sampang	1.230	445.487	468.012	913.499
28 Kab. Pamekasan	802	401.993	425.414	827.407
29 Kab. Sumenep	2.090	504.712	556.499	1.061.211
30 Kota Kediri	67	137.513	139.106	276.619
31 Kota Blitar	33	67.290	68.412	135.702
32 Kota Malang	110	415.101	425.702	840.803
33 Kota Probolinggo	56	110.486	113.395	223.881
34 Kota Pasuruan	38	95.010	97.275	192.285
35 Kota Mojokerto	20	60.704	63.102	123.806
36 Kota Madiun	34	84.281	89.833	174.114
37 Kota Surabaya	330	1.393.749	1.428.180	2.821.929
38 Kota Batu	200	98.913	97.276	196.189
<b>Jawa Timur</b>	<b>48,258</b>	<b>18.925.120</b>	<b>19.438.075</b>	<b>38.363.195</b>

Sumber : Badan Pertanahan Nasional dan BPS Provinsi Jawa Timur

**Tabel 2.**  
**Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Daerah**  
**Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota di Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)
1 Kab. Pacitan	26 Desember 2010	3
2 Kab. Ponorogo	3 Juli 2010	3
3 Kab. Trenggalek	2 Juni 2010	3
4 Kab. Tulungagung	31 Januari 2013	4
5 Kab. Blitar	9 November 2010	3
6 Kab. Kediri	12 Mei 2010	3
7 Kab. Malang	5 Agustus 2010	3
8 Kab. Lumajang	29 Mei 2013	4
9 Kab. Jember	7 Juli 2010	4
10 Kab. Banyuwangi	14 Juli 2010	3
11 Kab. Bondowoso	14 Juli 2013	2
12 Kab. Situbondo	22 Juni 2010	5
13 Kab. Probolinggo	8 November 2012	3
14 Kab. Pasuruan	3 Maret 2013	6
15 Kab. Sidoarjo	25 Juli 2010	5
16 Kab. Mojokerto	7 Juni 2010	3
17 Kab. Jombang	5 Juni 2013	3
18 Kab. Nganjuk	12 Desember 2012	6
19 Kab. Madiun	19 Juni 2013	4
20 Kab. Magetan	24 April 2013	3
21 Kab. Ngawi	2 Mei 2010	5
22 Kab. Bojonegoro	10 November 2012	5
23 Kab. Tuban	1 Maret 2011	6
24 Kab. Lamongan	23 Mei 2010	4
25 Kab. Gresik	26 Mei 2010	6
26 Kab. Bangkalan	12 Desember 2012	2
27 Kab. Sampang	12 Desember 2012	6
28 Kab. Pamekasan	9 Januari 2013	3
29 Kab. Sumenep	14 Juni 2010	8
30 Kota Kediri	29 Agustus 2013	7
31 Kota Blitar	27 Mei 2010	5
32 Kota Malang	23 Mei 2013	6
33 Kota Probolinggo	29 Agustus 2013	4
34 Kota Pasuruan	7 Juli 2010	4
35 Kota Mojokerto	29 Agustus 2013	6
36 Kota Madiun	29 Agustus 2013	6
37 Kota Surabaya	2 Juni 2010	6
38 Kota Batu	2 Oktober 2012	4

Sumber : KPUD Kabupaten/Kota di Jawa Timur



**Tabel 3.**  
**Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Terdaftar di DPT	Menggunakan Hak Pilih	% Suara Menggunakan Hak Pilih terhadap DPT
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kab. Pacitan	461.230	300.801	65,22
2 Kab. Ponorogo	774.069	541.209	69,92
3 Kab. Trenggalek	582.054	335.373	57,62
4 Kab. Tulungagung	844.111	519.666	61,56
5 Kab. Blitar	994.939	553.829	55,66
6 Kab. Kediri	1.173.319	743.159	63,34
7 Kab. Malang	1.862.537	1.121.187	60,20
8 Kab. Lumajang	819.765	563.786	68,77
9 Kab. Jember	1.714.548	998.271	58,22
10 Kab. Banyuwangi	1.290.033	756.209	58,62
11 Kab. Bondowoso	592.212	432.975	73,11
12 Kab. Situbondo	503.817	352.068	69,88
13 Kab. Probolinggo	842.952	629.274	74,65
14 Kab. Pasuruan	1.145.502	800.598	69,89
15 Kab. Sidoarjo	1.287.979	793.277	61,59
16 Kab. Mojokerto	789.961	606.402	76,76
17 Kab. Jombang	998.463	701.742	70,28
18 Kab. Nganjuk	891.228	564.100	63,29
19 Kab. Madiun	499.304	423.155	84,75
20 Kab. Magetan	553.724	399.407	72,13
21 Kab. Ngawi	707.440	500.992	70,82
22 Kab. Bojonegoro	1.038.378	740.338	71,30
23 Kab. Tuban	908.541	691.745	76,14
24 Kab. Lamongan	1.052.133	672.364	63,90
25 Kab. Gresik	868.804	608.221	70,01
26 Kab. Bangkalan	880.928	583.083	66,19
27 Kab. Sampang	676.146	530.745	78,50
28 Kab. Pamekasan	642.808	471.736	73,39
29 Kab. Sumenep	884.631	563.094	63,65
30 Kota Kediri	206.340	159.163	77,14
31 Kota Blitar	101.608	78.051	76,82
32 Kota Malang	612.464	399.025	65,15
33 Kota Probolinggo	164.722	137.385	83,40
34 Kota Pasuruan	135.117	102.400	75,79
35 Kota Mojokerto	93.737	76.304	81,40
36 Kota Madiun	142.463	103.356	72,55
37 Kota Surabaya	2.142.900	962.940	44,94
38 Kota Batu	146.877	111.988	76,25
<b>Jawa Timur</b>	<b>30.027.784</b>	<b>19.629.418</b>	<b>65,37</b>

Sumber : KPUD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

**Tabel 4.**  
**Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Terpilih di Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Partai Pendukung
	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kab. Pacitan	190.343	65,50	Demokrat, PKS, Hanura, PPP
2 Kab. Ponorogo	250.608	46,31	Golkar, PKNU
3 Kab. Trenggalek	170.054	54,29	PDIP, PKB, PPP
4 Kab. Tulungagung	233.738	44,98	PKNU, Gabungan Partai Kecil
5 Kab. Blitar	318.614	60,50	PDIP, Demokrat, Golkar, PPP, PKS, Gerindra
6 Kab. Kediri	391.079	54,58	PDIP, Golkar, Hanura, PPP, PKNU
7 Kab. Malang	672.511	62,04	Golkar, Demokrat
8 Kab. Lumajang	199.342	35,36	Demokrat, PAN, Golkar
9 Kab. Jember	567.864	58,37	PDIP, Golkar, PKNU, PAN, PPP, Hanura
10 Kab. Banyuwangi	372.149	50,40	PKB, PDIP, PKS, PKNU
11 Kab. Bondowoso	342.573	79,12	PKB, Golkar, PPP, Demokrat, PBB, PAN, PKPI, PKS, Gerindra, Barnas, PPRN, P.Merdeka, PPNUI, PSI, P.Republikan, PPD, PKPB
12 Kab. Situbondo	145.641	43,54	PKNU, Golkar
13 Kab. Probolinggo	250.892	40,72	PKB, PDIP
14 Kab. Pasuruan	309.416	41,47	PKB, Demokrat
15 Kab. Sidoarjo	450.586	60,46	Demokrat, PKB, Hanura, Golkar, PAN, Gerindra, dan aliansi 16 partai non parlemen
16 Kab. Mojokerto	338.417	65,89	PKB, PKS, PPP, PBB, PAN, PKPB, P.Patriot
17 Kab. Jombang	401.576	59,54	Golkar, Demokrat, PPP, PKS
18 Kab. Nganjuk	171.438	31,68	PDIP, PKB
19 Kab. Madiun	230.348	56,00	PKB, Demokrat
20 Kab. Magetan	227.612	58,97	PDIP
21 Kab. Ngawi	293.852	54,42	PDIP, PAN, Golkar, PKS
22 Kab. Bojonegoro	320.536	44,38	PAN, Demokrat, Gerindra
23 Kab. Tuban	374.147	55,18	PKB, PPP, Gerindra, PBB
24 Kab. Lamongan	268.806	40,91	PKB, Golkar, PAN, Demokrat
25 Kab. Gresik	233.531	39,49	PKB, PPP, PKNU
26 Kab. Bangkalan	505.986	93,47	PKB, PPP, Demokrat, PDIP, Gerindra, PAN, Hanura, Golkar, PDP
27 Kab. Sampang	163.483	31,44	PKS, PBR, PPNUI
28 Kab. Pamekasan	250.336	54,05	Demokrat, PPP, PAN, PKS, Hanura
29 Kab. Sumenep	241.622	51,00	PKB, PDIP
30 Kota Kediri	67.915	45,08	PAN, Gerindra, PPNUI
31 Kota Blitar	31.994	42,36	PDIP, PKB
32 Kota Malang	179.675	47,30	PKB, Gerindra
33 Kota Probolinggo	48.326	36,19	PDIP
34 Kota Pasuruan	35.798	36,01	PKB, Golkar, PPP, PAN
35 Kota Mojokerto	35.089	48,17	PKS, PKNU, PPP, PBB
36 Kota Madiun	49.600	50,37	Demokrat, PKB, PAN
37 Kota Surabaya	358.187	38,53	PDIP
38 Kota Batu	28.008	35,87	PDIP

Sumber : KPUD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

**Tabel 5.**  
**Kepala Daerah Hasil Pemilukada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia Saat Terpilih dan Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia Saat Dipilih	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	Laki-laki	S2	56	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
2 Kab. Ponorogo	Laki-laki	S1	56	Wakil Bupati
3 Kab. Trenggalek	Laki-laki	S3	56	Kepala Inspektorat Provinsi
4 Kab. Tulungagung	Laki-laki	S1	47	Anggota DPRD Provinsi
5 Kab. Blitar	Laki-laki	S2	51	Bupati Blitar
6 Kab. Kediri	Perempuan	S1	61	PNS
7 Kab. Malang	Laki-laki	S2	48	Wakil Bupati
8 Kab. Lumajang	Laki-laki	S3	64	Bupati
9 Kab. Jember	Laki-laki	S2	53	Bupati
10 Kab. Banyuwangi	Laki-laki	S2	37	Anggota DPRD RI
11 Kab. Bondowoso	Laki-laki	S1	47	Kepala Daerah
12 Kab. Situbondo	Laki-laki	S1	45	Wakil Ketua DPRD
13 Kab. Probolinggo	Perempuan	S1	29	Ketua TIM Penggerak KPK
14 Kab. Pasuruan	Laki-laki	S1	42	Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan
15 Kab. Sidoarjo	Laki-laki	S3	63	Wakil Bupati
16 Kab. Mojokerto	Laki-laki	S1	37	Wiraswasta
17 Kab. Jombang	Laki-laki	S1	51	Anggota DPRD
18 Kab. Nganjuk	Laki-laki	S1	49	Bupati
19 Kab. Madiun	Laki-laki	S1	57	Bupati Madiun
20 Kab. Magetan	Laki-laki	S2	65	Bupati
21 Kab. Ngawi	Laki-laki	S1	50	Wakil Bupati
22 Kab. Bojonegoro	Laki-laki	S2	47	Bupati Bojonegoro
23 Kab. Tuban	Laki-laki	SLTA	57	Wiraswasta
24 Kab. Lamongan	Laki-laki	S2	53	Sekretaris Daerah
25 Kab. Gresik	Laki-laki	S3	51	Pengusaha
26 Kab. Bangkalan	Laki-laki	S1	27	DPRD
27 Kab. Sampang	Laki-laki	S1	51	Wakil Bupati
28 Kab. Pamekasan	Laki-laki	S2	49	Anggota DPR
29 Kab. Sumenep	Laki-laki	S2	49	Pengasuh PP AL-Komariah
30 Kota Kediri	Laki-laki	S1	33	Wakil Walikota Kediri
31 Kota Blitar	Laki-laki	S1	45	Ketua DPRD
32 Kota Malang	Laki-laki	S1	47	Pengusaha
33 Kota Probolinggo	Perempuan	S2	58	Anggota DPR
34 Kota Pasuruan	Laki-laki	S1	54	Ketua DPRD
35 Kota Mojokerto	Laki-laki	S2	61	Wakil Walikota
36 Kota Madiun	Laki-laki	S2	62	Kepala Daerah
37 Kota Surabaya	Perempuan	S2	48	Kepala DKP
38 Kota Batu	Laki-laki	SLTA	52	Walikota Batu

Sumber : KPUD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

**Tabel 6.**  
**Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur dan Jenis Kelamin					
	21 – 35 Tahun		36 – 49 Tahun		50 – 59 Tahun	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	4	1	26	7	5	0
2 Kab. Ponorogo	2	1	25	4	12	1
3 Kab. Trenggalek	1	1	15	5	16	1
4 Kab. Tulungagung	0	0	27	1	17	0
5 Kab. Blitar	8	1	32	3	4	0
6 Kab. Kediri	1	2	24	8	8	2
7 Kab. Malang	2	1	21	6	13	3
8 Kab. Lumajang	9	2	32	1	3	1
9 Kab. Jember	1	1	32	4	10	0
10 Kab. Banyuwangi	3	2	25	6	11	1
11 Kab. Bondowoso	11	1	24	1	7	0
12 Kab. Situbondo	16	6	13	3	3	2
13 Kab. Probolinggo	5	2	24	3	13	2
14 Kab. Pasuruan	2	0	23	12	13	0
15 Kab. Sidoarjo	3	1	24	4	14	2
16 Kab. Mojokerto	3	1	22	6	8	2
17 Kab. Jombang	6	0	24	2	13	1
18 Kab. Nganjuk	6	4	26	2	9	2
19 Kab. Madiun	2	1	23	4	8	1
20 Kab. Magetan	7	0	31	6	1	0
21 Kab. Ngawi	5	0	17	6	8	2
22 Kab. Bojonegoro	2	1	31	7	7	1
23 Kab. Tuban	1	0	28	9	8	1
24 Kab. Lamongan	1	0	22	5	17	1
25 Kab. Gresik	2	1	26	4	14	3
26 Kab. Bangkalan	5	0	28	1	10	0
27 Kab. Sampang	10	1	29	0	4	0
28 Kab. Pamekasan	7	0	23	1	11	0
29 Kab. Sumenep	10	0	30	3	7	0
30 Kota Kediri	2	1	11	3	7	3
31 Kota Blitar	0	0	13	4	7	0
32 Kota Malang	1	0	19	7	12	3
33 Kota Probolinggo	2	1	12	6	3	2
34 Kota Pasuruan	3	1	16	0	2	0
35 Kota Mojokerto	3	0	10	2	9	1
36 Kota Madiun	0	0	8	6	8	3
37 Kota Surabaya	2	3	19	7	14	3
38 Kota Batu	1	0	10	7	5	1
<b>Jawa Timur</b>	<b>149</b>	<b>37</b>	<b>845</b>	<b>166</b>	<b>341</b>	<b>45</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Tabel 6. (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur dan Jenis Kelamin				
	60 + Tahun		Jumlah Total		
	L	P	L	P	L+P
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 Kab. Pacitan	2	0	37	8	45
2 Kab. Ponorogo	4	1	43	7	50
3 Kab. Trenggalek	4	2	36	9	45
4 Kab. Tulungagung	5	0	49	1	50
5 Kab. Blitar	2	0	46	4	50
6 Kab. Kediri	3	2	36	14	50
7 Kab. Malang	4	0	40	10	50
8 Kab. Lumajang	2	0	46	4	50
9 Kab. Jember	2	0	45	5	50
10 Kab. Banyuwangi	2	0	41	9	50
11 Kab. Bondowoso	1	0	43	2	45
12 Kab. Situbondo	2	0	34	11	45
13 Kab. Probolinggo	1	0	43	7	50
14 Kab. Pasuruan	0	0	38	12	50
15 Kab. Sidoarjo	1	0	42	7	49
16 Kab. Mojokerto	3	0	36	9	45
17 Kab. Jombang	3	1	46	4	50
18 Kab. Nganjuk	1	0	42	8	50
19 Kab. Madiun	6	0	39	6	45
20 Kab. Magetan	0	0	39	6	45
21 Kab. Ngawi	6	1	36	9	45
22 Kab. Bojonegoro	1	0	41	9	50
23 Kab. Tuban	3	0	40	10	50
24 Kab. Lamongan	4	0	44	6	50
25 Kab. Gresik	0	0	42	8	50
26 Kab. Bangkalan	1	0	44	1	45
27 Kab. Sampang	1	0	44	1	45
28 Kab. Pamekasan	2	1	43	2	45
29 Kab. Sumenep	0	0	47	3	50
30 Kota Kediri	3	0	23	7	30
31 Kota Blitar	1	0	21	4	25
32 Kota Malang	1	2	33	12	45
33 Kota Probolinggo	3	1	20	10	30
34 Kota Pasuruan	2	1	23	2	25
35 Kota Mojokerto	0	0	22	3	25
36 Kota Madiun	4	1	20	10	30
37 Kota Surabaya	1	1	36	14	50
38 Kota Batu	1	0	17	8	25
<b>Jawa Timur</b>	<b>82</b>	<b>14</b>	<b>1.417</b>	<b>262</b>	<b>1.679</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

**Tabel 7.**  
**Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Pendidikan Terakhir					
	< SLTA		SLTA Sederajat		D1 - D3	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	0	0	24	5	1	0
2 Kab. Ponorogo	0	0	9	4	0	0
3 Kab. Trenggalek	0	0	12	1	1	0
4 Kab. Tulungagung	0	0	15	0	3	0
5 Kab. Blitar	0	0	16	0	0	0
6 Kab. Kediri	0	0	9	8	2	2
7 Kab. Malang	1	0	5	3	4	1
8 Kab. Lumajang	0	0	22	2	1	0
9 Kab. Jember	0	0	12	2	0	0
10 Kab. Banyuwangi	0	0	8	3	0	0
11 Kab. Bondowoso	0	0	14	1	0	0
12 Kab. Situbondo	0	0	10	2	0	0
13 Kab. Probolinggo	0	0	11	1	2	0
14 Kab. Pasuruan	0	0	11	3	2	0
15 Kab. Sidoarjo	0	0	14	1	0	0
16 Kab. Mojokerto	0	0	7	2	0	0
17 Kab. Jombang	0	0	19	2	1	0
18 Kab. Nganjuk	0	0	17	6	1	0
19 Kab. Madiun	0	0	6	3	0	0
20 Kab. Magetan	0	0	19	4	2	1
21 Kab. Ngawi	0	0	11	6	2	1
22 Kab. Bojonegoro	0	0	15	2	1	0
23 Kab. Tuban	0	0	11	2	0	0
24 Kab. Lamongan	0	0	5	0	0	0
25 Kab. Gresik	0	0	5	1	0	0
26 Kab. Bangkalan	0	0	7	0	1	0
27 Kab. Sampang	0	0	25	1	1	0
28 Kab. Pamekasan	0	0	19	0	2	0
29 Kab. Sumenep	0	0	11	2	0	0
30 Kota Kediri	0	0	2	0	0	0
31 Kota Blitar	0	0	8	0	0	0
32 Kota Malang	0	0	2	0	0	0
33 Kota Probolinggo	0	0	11	4	0	1
34 Kota Pasuruan	0	0	9	0	1	0
35 Kota Mojokerto	0	0	6	1	0	0
36 Kota Madiun	0	0	5	3	1	0
37 Kota Surabaya	0	0	0	0	1	0
38 Kota Batu	0	0	2	1	0	0
<b>Jawa Timur</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>76</b>	<b>30</b>	<b>6</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Tabel 7. (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Pendidikan terakhir						
	D.IV/S1		S2/S3		Jumlah Total		
	L	P	L	P	L	P	L+P
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1 Kab. Pacitan	12	3	0	0	37	8	45
2 Kab. Ponorogo	27	2	7	1	43	7	50
3 Kab. Trenggalek	13	5	10	3	36	9	45
4 Kab. Tulungagung	24	1	7	0	49	1	50
5 Kab. Blitar	26	3	4	1	46	4	50
6 Kab. Kediri	21	2	4	2	36	14	50
7 Kab. Malang	21	6	9	0	40	10	50
8 Kab. Lumajang	22	2	1	0	46	4	50
9 Kab. Jember	29	2	4	1	45	5	50
10 Kab. Banyuwangi	22	5	11	1	41	9	50
11 Kab. Bondowoso	21	1	8	0	43	2	45
12 Kab. Situbondo	21	7	3	2	34	11	45
13 Kab. Probolinggo	25	5	5	1	43	7	50
14 Kab. Pasuruan	19	8	6	1	38	12	50
15 Kab. Sidoarjo	21	5	7	1	42	7	49
16 Kab. Mojokerto	24	5	5	2	36	9	45
17 Kab. Jombang	22	2	4	0	46	4	50
18 Kab. Nganjuk	21	2	3	0	42	8	50
19 Kab. Madiun	22	3	11	0	39	6	45
20 Kab. Magetan	18	1	0	0	39	6	45
21 Kab. Ngawi	15	1	8	1	36	9	45
22 Kab. Bojonegoro	17	5	8	2	41	9	50
23 Kab. Tuban	29	8	0	0	40	10	50
24 Kab. Lamongan	28	6	11	0	44	6	50
25 Kab. Gresik	29	5	8	2	42	8	50
26 Kab. Bangkalan	33	1	3	0	44	1	45
27 Kab. Sampang	17	0	1	0	44	1	45
28 Kab. Pamekasan	21	2	1	0	43	2	45
29 Kab. Sumenep	28	1	8	0	47	3	50
30 Kota Kediri	13	6	8	1	23	7	30
31 Kota Blitar	12	4	1	0	21	4	25
32 Kota Malang	24	6	7	6	33	12	45
33 Kota Probolinggo	6	5	3	0	20	10	30
34 Kota Pasuruan	11	2	2	0	23	2	25
35 Kota Mojokerto	13	2	3	0	22	3	25
36 Kota Madiun	8	7	6	0	20	10	30
37 Kota Surabaya	35	14	0	0	36	14	50
38 Kota Batu	12	6	3	1	17	8	25
<b>Jawa Timur</b>	<b>782</b>	<b>151</b>	<b>190</b>	<b>29</b>	<b>1417</b>	<b>262</b>	<b>1.679</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

**Tabel 8.**  
**Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja**  
**di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Poltabes	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kab. Pacitan		1	12
2 Kab. Ponorogo		1	21
3 Kab. Trenggalek		1	13
4 Kab. Tulungagung		1	19
5 Kab. Blitar		1	21
6 Kab. Kediri		1	20
7 Kab. Malang		1	33
8 Kab. Lumajang		1	21
9 Kab. Jember		1	30
10 Kab. Banyuwangi		1	25
11 Kab. Bondowoso		1	20
12 Kab. Situbondo		1	17
13 Kab. Probolinggo		1	27
14 Kab. Pasuruan		1	13
15 Kab. Sidoarjo		1	18
16 Kab. Mojokerto		1	11
17 Kab. Jombang		1	21
18 Kab. Nganjuk		1	20
19 Kab. Madiun		1	13
20 Kab. Magetan		1	17
21 Kab. Ngawi		1	17
22 Kab. Bojonegoro		1	22
23 Kab. Tuban		1	20
24 Kab. Lamongan		1	27
25 Kab. Gresik		1	19
26 Kab. Bangkalan		1	17
27 Kab. Sampang		1	13
28 Kab. Pamekasan		1	13
29 Kab. Sumenep		1	26
30 Kota Kediri		1	3
31 Kota Blitar		1	9
32 Kota Malang		1	5
33 Kota Probolinggo		1	3
34 Kota Pasuruan		1	10
35 Kota Mojokerto		1	9
36 Kota Madiun		1	5
37 Kota Surabaya	1	1	31
38 Kota Batu		1	3
<b>Jawa Timur</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>644</b>

Sumber : Polres/Polresta Kabupaten/Kota



**Tabel 9**  
**Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan Diselesaikan (*Crime Cleared*) di**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2013**

Kabupaten/Kota	Dilaporkan			Diselesaikan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	159	137	123	153	129	115
2 Kab. Ponorogo	377	396	476	266	311	336
3 Kab. Trenggalek	419	372	371	301	243	224
4 Kab. Tulungagung	937	664	793	739	446	536
5 Kab. Blitar	553	469	471	451	404	406
6 Kab. Kediri	923	796	646	729	607	434
7 Kab. Malang	2.036	1.695	1.879	1.063	999	1.002
8 Kab. Lumajang	737	378	364	592	289	335
9 Kab. Jember	3.239	2.090	2.355	2.720	1.537	1.825
10 Kab. Banyuwangi	1.819	1.507	1.350	1.163	875	955
11 Kab. Bondowoso	821	881	913	304	281	405
12 Kab. Situbondo	1.338	1.130	1.425	921	795	1.059
13 Kab. Probolinggo	1.164	982	876	797	731	650
14 Kab. Pasuruan	983	771	638	729	533	465
15 Kab. Sidoarjo	1.565	1.373	1.634	1.269	1.033	1.332
16 Kab. Mojokerto	666	747	566	432	525	428
17 Kab. Jombang	943	1.897	1.970	664	1.799	1.543
18 Kab. Nganjuk	729	291	815	443	139	521
19 Kab. Madiun	457	358	314	411	307	293
20 Kab. Magetan	475	452	386	366	361	314
21 Kab. Ngawi	728	727	689	532	446	505
22 Kab. Bojonegoro	854	638	708	553	358	410
23 Kab. Tuban	624	582	651	559	503	565
24 Kab. Lamongan	577	559	614	135	372	432
25 Kab. Gresik	719	790	903	507	302	441
26 Kab. Bangkalan	405	465	458	275	231	280
27 Kab. Sampang	368	311	419	267	203	265
28 Kab. Pamekasan	692	600	579	483	283	279
29 Kab. Sumenep	616	623	589	341	297	234
30 Kota Kediri	449	430	516	227	227	262
31 Kota Blitar	321	306	511	177	160	257
32 Kota Malang	3.494	3.977	4.312	1.389	1.203	1.196
33 Kota Probolinggo	408	459	450	265	336	268
34 Kota Pasuruan	343	404	413	237	216	233
35 Kota Mojokerto	277	338	578	163	191	367
36 Kota Madiun	447	443	400	268	238	267
37 Kota Surabaya	6.736	4.884	4.909	5.130	3.843	3.285
38 Kota Batu	340	338	256	113	119	162
<b>Jawa Timur</b>	<b>35.244</b>	<b>34.260</b>	<b>36.320</b>	<b>24.745</b>	<b>20.669</b>	<b>21.690</b>

Sumber : Polres/Polresta Kabupaten/Kota

**Tabel 10.**  
**Persentase Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 – 2013**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kab. Pacitan	96,23	94,16	93,50
2 Kab. Ponorogo	70,55	78,53	70,56
3 Kab. Trenggalek	71,80	65,00	60,00
4 Kab. Tulungagung	78,87	67,17	67,59
5 Kab. Blitar	81,00	86,00	86,00
6 Kab. Kediri	78,98	76,25	67,18
7 Kab. Malang	40,97	38,51	38,62
8 Kab. Lumajang	80,32	76,45	92,03
9 Kab. Jember	83,98	73,54	77,49
10 Kab. Banyuwangi	64,00	58,00	72,00
11 Kab. Bondowoso	37,03	31,89	50,93
12 Kab. Situbondo	68,83	70,35	74,31
13 Kab. Probolinggo	68,00	74,00	74,20
14 Kab. Pasuruan	74,16	69,13	72,88
15 Kab. Sidoarjo	81,80	75,23	81,51
16 Kab. Mojokerto	64,90	70,30	74,90
17 Kab. Jombang	70,40	94,83	78,32
18 Kab. Nganjuk	54,16	47,76	63,92
19 Kab. Madiun	89,93	83,42	85,92
20 Kab. Magetan	69,00	65,00	65,00
21 Kab. Ngawi	73,00	61,30	73,30
22 Kab. Bojonegoro	64,75	56,11	57,90
23 Kab. Tuban	89,58	86,79	86,43
24 Kab. Lamongan	23,39	66,54	67,75
25 Kab. Gresik	70,00	39,00	49,00
26 Kab. Bangkalan	67,90	49,70	62,00
27 Kab. Sampang	72,25	64,95	63,24
28 Kab. Pamekasan	69,79	47,62	48,18
29 Kab. Sumenep	55,36	48,58	39,73
30 Kota Kediri	50,55	51,83	50,77
31 Kota Blitar	55,00	52,00	50,29
32 Kota Malang	39,75	30,75	27,73
33 Kota Probolinggo	67,60	63,40	68,00
34 Kota Pasuruan	69,00	53,00	54,00
35 Kota Mojokerto	59,00	57,00	63,00
36 Kota Madiun	59,96	53,72	66,75
37 Kota Surabaya	76,15	78,68	66,91
38 Kota Batu	33,20	77,17	63,00
<b>Jawa Timur</b>	70,21	60,33	59,72

Sumber : Polres/Polresta Kabupaten/Kota

**Tabel 11.**  
**Jumlah Pengelompokan Jenis Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia**  
**di Jawa Timur Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat	Penculikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kab. Pacitan	0	0	4	2	0
2 Kab. Ponorogo	5	0	4	10	0
3 Kab. Trenggalek	1	0	8	20	0
4 Kab. Tulungagung	3	1	10	31	0
5 Kab. Blitar	1	5	9	19	0
6 Kab. Kediri	2	3	2	23	0
7 Kab. Malang	2	8	57	84	0
8 Kab. Lumajang	3	0	14	25	0
9 Kab. Jember	6	16	201	141	0
10 Kab. Banyuwangi	5	3	7	107	0
11 Kab. Bondowoso	5	6	12	118	1
12 Kab. Situbondo	1	2	33	214	0
13 Kab. Probolinggo	4	3	17	25	0
14 Kab. Pasuruan	6	1	8	26	0
15 Kab. Sidoarjo	5	1	127	68	0
16 Kab. Mojokerto	0	1	6	25	0
17 Kab. Jombang	1	12	109	26	5
18 Kab. Nganjuk	2	3	3	43	0
19 Kab. Madiun	1	2	7	0	0
20 Kab. Magetan	2	10	3	2	1
21 Kab. Ngawi	0	1	11	0	0
22 Kab. Bojonegoro	2	0	15	29	0
23 Kab. Tuban	4	0	8	46	0
24 Kab. Lamongan	0	0	3	0	0
25 Kab. Gresik	3	1	24	30	0
26 Kab. Bangkalan	11	10	5	24	1
27 Kab. Sampang	5	1	21	3	0
28 Kab. Pamekasan	2	2	7	1	0
29 Kab. Sumenep *)	7	6	84	8	0
30 Kota Kediri	0	0	30	0	0
31 Kota Blitar	1	0	7	18	1
32 Kota Malang	1	0	50	131	0
33 Kota Probolinggo	1	0	16	1	0
34 Kota Pasuruan	0	2	10	20	0
35 Kota Mojokerto	1	0	0	34	0
36 Kota Madiun	1	0	23	1	0
37 Kota Surabaya	5	14	39	267	0
38 Kota Batu	0	0	8	0	0
<b>Jawa Timur</b>	<b>99</b>	<b>114</b>	<b>1.002</b>	<b>1.622</b>	<b>9</b>

Keterangan: \*) data tahun 2012

Sumber : Polres/Polresta Kabupaten/Kota

**Tabel 12.**  
**Jumlah Pengelompokan Jenis Tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang)**  
**di Jawa Timur Tahun 2013**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kab. Pacitan	0	0	31	0	3
2 Kab. Ponorogo	0	5	74	36	3
3 Kab. Trenggalek	0	2	62	137	1
4 Kab. Tulungagung	0	11	88	52	9
5 Kab. Blitar	1	8	65	22	7
6 Kab. Kediri	0	2	70	13	15
7 Kab. Malang	6	28	364	70	59
8 Kab. Lumajang	1	0	52	14	36
9 Kab. Jember	10	57	195	76	24
10 Kab. Banyuwangi	1	14	260	0	30
11 Kab. Bondowoso	0	24	138	55	10
12 Kab. Situbondo	0	27	159	0	19
13 Kab. Probolinggo	0	30	103	34	28
14 Kab. Pasuruan	0	0	131	0	100
15 Kab. Sidoarjo	0	18	193	97	62
16 Kab. Mojokerto	0	5	65	8	26
17 Kab. Jombang	0	9	116	57	43
18 Kab. Nganjuk	1	6	91	55	16
19 Kab. Madiun	0	4	29	11	6
20 Kab. Magetan	0	6	64	10	5
21 Kab. Ngawi	0	11	147	0	1
22 Kab. Bojonegoro	0	8	86	58	16
23 Kab. Tuban	0	6	82	33	7
24 Kab. Lamongan	1	7	71	39	16
25 Kab. Gresik	0	9	145	0	33
26 Kab. Bangkalan	0	0	88	14	44
27 Kab. Sampang	0	0	52	1	9
28 Kab. Pamekasan	0	7	46	23	5
29 Kab. Sumenep *)	7	11	55	24	6
30 Kota Kediri	0	2	83	0	5
31 Kota Blitar	0	3	83	56	12
32 Kota Malang	0	26	678	376	57
33 Kota Probolinggo	0	3	15	1	4
34 Kota Pasuruan	0	6	56	0	17
35 Kota Mojokerto	0	0	99	37	31
36 Kota Madiun	0	2	62	46	9
37 Kota Surabaya	89	20	630	0	184
38 Kota Batu	0	0	65	16	4
<b>Jawa Timur</b>	<b>117</b>	<b>377</b>	<b>4.893</b>	<b>1.471</b>	<b>962</b>

Keterangan: 1.Pembakaran dengan sengaja  
2.Pengrusakan/penghancuran barang  
3.Pencurian dengan pemberatan  
4.Pencurian ringan  
5.Pencurian dengan kekerasan  
\*) data tahun 2012

Sumber : Polres/Polresta Kabupaten/Kota

**Tabel 12. Lanjutan**  
**Jumlah Pengelompokan Jenis Tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang)**  
**di Jawa Timur Tahun 2013**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	0	4	0	4	11
2 Kab. Ponorogo	1	33	0	67	0
3 Kab. Trenggalek	0	22	3	55	0
4 Kab. Tulungagung	0	116	3	75	0
5 Kab. Blitar	0	6	3	31	7
6 Kab. Kediri	0	68	3	67	0
7 Kab. Malang	2	172	1	246	0
8 Kab. Lumajang	0	7	5	47	13
9 Kab. Jember	23	154	19	224	0
10 Kab. Banyuwangi	1	115	7	90	17
11 Kab. Bondowoso	2	105	2	72	0
12 Kab. Situbondo	0	250	6	30	37
13 Kab. Probolinggo	0	61	4	77	30
14 Kab. Pasuruan	0	28	2	39	0
15 Kab. Sidoarjo	0	217	2	64	0
16 Kab. Mojokerto	0	16	3	38	1
17 Kab. Jombang	0	134	0	77	7
18 Kab. Nganjuk	2	85	0	66	11
19 Kab. Madiun	0	25	2	31	2
20 Kab. Magetan	0	28	0	46	2
21 Kab. Ngawi	0	54	6	57	0
22 Kab. Bojonegoro	0	114	89	0	0
23 Kab. Tuban	0	41	2	73	5
24 Kab. Lamongan	7	31	32	125	0
25 Kab. Gresik	1	99	0	116	0
26 Kab. Bangkalan	0	24	0	21	0
27 Kab. Sampang	0	40	0	68	0
28 Kab. Pamekasan	1	47	0	139	3
29 Kab. Sumenep *)	0	48	10	135	24
30 Kota Kediri	0	81	0	83	38
31 Kota Blitar	0	50	0	76	0
32 Kota Malang	0	512	0	1.399	0
33 Kota Probolinggo	2	10	1	0	0
34 Kota Pasuruan	0	62	1	53	0
35 Kota Mojokerto	0	30	0	65	5
36 Kota Madiun	0	26	0	66	0
37 Kota Surabaya	4	577	30	287	22
38 Kota Batu	0	34	0	65	0
<b>Jawa Timur</b>	<b>46</b>	<b>3.526</b>	<b>236</b>	<b>4.274</b>	<b>235</b>

Keterangan: 6.Pencurian dalam keluarga  
7.Penipuan/perbuatan curang  
8.Penadahan  
\*) data tahun 2012

9.Pencurian kendaraan bermotor  
10.Pencurian lainnya

Sumber : Polres/Polresta Kabupaten/Kota

**Tabel 13.**  
**Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin**  
**Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-Anak		Jumlah Total		
	L	P	L	P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Kab. Pacitan	150	6	28	0	178	6	184
2 Kab. Ponorogo	543	94	36	13	579	107	686
3 Kab. Trenggalek	326	7	35	0	361	7	368
4 Kab. Tulungagung *)	394	31	33	0	427	31	458
5 Kab. Blitar	343	39	71	32	414	71	485
6 Kab. Kediri	392	24	18	0	410	24	434
7 Kab. Malang	929	4	69	0	998	4	1.002
8 Kab. Lumajang	415	1	36	0	451	1	452
9 Kab. Jember	1.818	17	9	2	1.827	19	1.846
10 Kab. Banyuwangi	940	135	88	0	1.028	135	1.163
11 Kab. Bondowoso	450	10	5	0	455	10	465
12 Kab. Situbondo	1.362	8	16	4	1.378	12	1.390
13 Kab. Probolinggo	568	63	19	0	587	63	650
14 Kab. Pasuruan	607	5	26	0	633	5	638
15 Kab. Sidoarjo	1.026	42	82	0	1.108	42	1.150
16 Kab. Mojokerto	358	70	0	9	358	79	437
17 Kab. Jombang	687	29	25	0	712	29	741
18 Kab. Nganjuk	349	20	20	0	369	20	389
19 Kab. Madiun	249	15	29	0	278	15	293
20 Kab. Magetan	293	13	25	0	318	13	331
21 Kab. Ngawi	513	49	59	1	572	50	622
22 Kab. Bojonegoro	489	2	71	0	560	2	562
23 Kab. Tuban	747	25	42	27	789	52	841
24 Kab. Lamongan	566	6	52	0	618	6	624
25 Kab. Gresik	687	37	45	0	732	37	769
26 Kab. Bangkalan	343	5	16	0	359	5	364
27 Kab. Sampang	246	12	14	1	260	13	273
28 Kab. Pamekasan	142	25	7	0	149	25	174
29 Kab. Sumenep *)	211	6	12	1	223	7	230
30 Kota Kediri	248	22	11	0	259	22	281
31 Kota Blitar	236	24	20	1	256	25	281
32 Kota Malang	663	165	21	0	684	165	849
33 Kota Probolinggo	261	5	2	0	263	5	268
34 Kota Pasuruan	212	7	4	0	216	7	223
35 Kota Mojokerto	83	5	3	0	86	5	91
36 Kota Madiun	217	17	33	0	250	17	267
37 Kota Surabaya	5.316	401	126	7	5.442	408	5.850
38 Kota Batu	159	3	4	0	163	3	166
<b>Jawa Timur</b>	<b>23.538</b>	<b>1.449</b>	<b>1.212</b>	<b>98</b>	<b>24.750</b>	<b>1.547</b>	<b>26.297</b>

Keterangan: \*) data tahun 2012

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44, Surabaya - 60292

Telp. 031 - 8439343 Fax. 031 - 8494007

Homepage: <http://www.jatim.bps.go.id> E-mail: [bps3500@bps.go.id](mailto:bps3500@bps.go.id)